



Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakteristik Dewan Komisaris, Pengungkapan Manajemen Resiko Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko

Riana Rachmawati Dewi

Universitas Islam Batik

Kartika Hendra Titisari

Universitas Islam Batik

Korespondensi penulis : rianardewi@gmail.com

ABSTRACT. *This study aims to examine and analyze the influence of institutional ownership, characteristics of the board of commissioners on risk management disclosures on the existence of a risk management committee (RMC). The population in this study are mining companies and various industries listed on the IDX in 2021, namely 102 companies. The sampling technique uses a purposive sampling method and the results are only 45 companies that are included in the sample criteria. Data analysis technique uses logistic regression. The test results show that institutional ownership and independent commissioners have no effect on the existence of a risk management committee (RMC), while education, experience and disclosure of risk management have an effect on the presence of a risk management committee (RMC). These results indicate that risk management should be carried out by the company to develop a follow-up strategy so that business continuity is maintained under the supervision of the board of commissioners and included in the company's annual report.*

Keywords: Risk Management, Disclosure, Board Of Commisioners

ABSTRAK. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan melakukan analisis pada pengaruh kepemilikan institusional, karakteristik dewan komisaris atas pengungkapan manajemen resiko terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan aneka industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 yaitu 102 perusahaan. Teknik sampling menggunakan metode purposive sampling dan hasilnya hanya 45 perusahaan yang masuk dalam kriteria sampel. Teknik analisa data menggunakan *logistic regression*. Hasil uji menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) sedangkan pendidikan, pengalaman dan pengungkapan manajemen resiko ternyata berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC). Hasil ini menunjukkan manajemen resiko seharusnya diadakan oleh perusahaan untuk membuat strategi lanjutan agar keberlangsungan bisnis terjaga dibawah pengawasan dewan komisaris dan disampaikan ke dalam laporan tahunan perusahaan.

Kata Kunci : Manajemen Resiko, Pengungkapan, Dewan Komisaris

LATAR BELAKANG

Pandemi COVID yang mulai mengemuka sebagai penyakit yang mematikan pada tahun 2019 merambah sampai mendunia pada tahun 2020 mulai menjadi menyebabkan banyaknya industri yang mulai merosot dan terpuruk sehingga pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan drastis atau hanya mampu memberikan pertumbuhan negatif berkisar 3,1%. Adanya kondisi yang mengejutkan tersebut membuat pemerintah Indonesia mulai merevisi kebijakan yang pernah diambil terutama bidang kesehatan, perpajakan, ketenagakerjaan, ekonomi dan sektor perbankan dan Lembaga keuangan untuk mengurangi

dampak dan agar tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi yang diluar perkiraan banyak pihak. Seluruh dunia mengalami penurunan dalam kinerja pada semua sektor dan merasakan hal yang luar biasa berat sehingga pemerintah di setiap negara harus berupaya dan menyusun manajemen strategi agar resiko yang terjadi dapat diminimalkan dan tetap dapat bertumbuh pada tahun 2021.

IMF memperkirakan bahwa ekonomi global dapat tumbuh pada angka 5,9% mulai tahun 2021. Kompleksitas resiko global yang dialami dan dapat berimbas pada ekonomi yang mengalami perlambatan sehingga perlu waspada atas pelayanan vaksinasi yang masih belum menjangkau semua masyarakat, pemikiran atas munculnya krisis energi, resiko tingkat inflasi, penurunan stimulus di bidang ekonomi pada hampir semua negara. Perubahan yang sangat cepat dalam bidang ekonomi secara global dan teknologi serta banyak hal lainnya mengakibatkan Perseroan/perusahaan dalam menyusun rencana dan rumusan strategi serta kebijakan diarahkan komprehensif dan mampu beradaptasi cepat dengan perubahan. Strategi dan kebijakan yang disusun difokuskan pada ketangguhan dan nantinya akan menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan (Jovanović et al., 2016).

Di Indonesia, adanya peraturan dari pemerintah yang mengatur perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 untuk mempunyai organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Di dalam organ Perseroan tersebut juga terdapat aturan wewenang dan tanggungjawab berdasarkan fungsinya dan disesuaikan dengan hal yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan aturan Undang-Undang serta menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan dalam waktu yang lama. Persamaan persepsi dan pola pikir antara Direksi dan Dewan Komisaris harus dimiliki dalam menterjemahkan visi, misi dan nilai-nilai dalam perusahaan. Banyaknya personal dalam Komisaris Independen diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan yang sudah tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Dimana perusahaan yang sudah go publik harus mempunyai jumlah Komisaris Independen sekurang kurangnya 30% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris .

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) merupakan organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengatur standar atau pedoman dan wajib dipatuhi oleh Perusahaan yang sudah terdaftar di Pasar Modal. Pada tahun 2011 pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan peran BAPEPAM. Peraturan yang telah diterbitkan oleh BAPEPAM selama organisasi itu aktif yaitu terkait penyajian dan pelaporan keuangan emiten nomor KEP-431/BL/2012 dan masih berlaku. Peraturan tentang pengungkapan manajemen

resiko juga telah diterbitkan oleh BAPEPAM yang disampaikan dalam laporan tahunan (annual report) dan upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan resiko yang ada. Peraturan lain yang juga mendukung adalah PSAK nomor 60 (Revisi tahun 2010) yang mengatur tentang Instrumen Keuangan : hal Pengungkapan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek baik yang masuk katagori keuangan dan non keuangan wajib menyampaikn informasi secara jelas dan tertulis atas resiko didalam laporan tahunan meskipun luas pengungkapan minimal atas manajemen resiko tidak terdapat dalam kedua aturan / ketentuan tersebut.

Perusahaan non keuangan tidak terikat secara wajib tentang aturan tentang informasi praktik manajemen risiko minimum yang wajib. Pada aturan OJK yang terbaru nomor 57/POJK.04/2017 muncul aturan yang menjelaskan pengungkapan minimum atas laporan manajemen resiko. Pengungkapan manajemen resiko dijelaskan juga dalam ISO 31000:2018 dan dijelaskan juga dalam COSO sebagai *framework Enterprise Risk Management (ERM)* (Ruhana, 2014).

Dewan komisaris mempunyai tugas dalam pengawasan atas penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan mempunyai manajemen risiko yang efektif (Ratna et al., 2019). Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat pengungkapan *enterprise risk management* (Mousa & Elamir, 2014). Asimetri informasi akan berkurang jika memiliki dewan komisaris, karena perusahaan akan mengeluarkan biaya agen untuk membayar Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas. Penelitian (Falendro et al., 2018), (Andarini & Januarti, 2012), (Juwita & Jurnal, 2020) memberikan kesimpulan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. (Hasina et al., 2018) menjelaskan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Perusahaan dalam melaksanakan manajemen resiko secara baik dan benar selanjutnya akan mendukung dalam pelaksanaan Good Corporate Governance melalui perencanaan bisnis dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi (Noor et al., 2016). Pengungkapan manajemen resiko perusahaan dapat mengendalikan volatitas laba sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Mohammed & Knapkova, 2016) dan (Karunaratne, 2017) dan meningkatkan nilai perusahaan (Badriyah et al., 2015).

Pengawasan diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif. Dewan komisaris memiliki peran dalam bentuk pengawasan ppenerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif (Alshirah et al., 2020). Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat

memberikan mandat atau delegasi tugasnya dalam pengawasan risiko kepada komite. Komite tersebut diharapkan dapat mendiskusikan kebijakan dan panduan untuk mengatur proses manajemen risiko perusahaan (Alshirah et al., 2020). Komite tersebut dapat berbentuk komite audit atau komite lain yang terpisah dari audit internal dan berdiri sendiri, meskipun demikian tanggung jawab utama dari pengawasan manajemen risiko tetap di tangan dewan komisaris secara penuh (Bensaid et al., 2021) Instrumen manajemen risiko sudah banyak dikembangkan oleh lembaga atau institusi yang ahli dibidangnya, tetapi masih belum banyak ide atau masukan yang didapatkan dari pihak yang berada diluar bidang manajemen risiko tetapi mempunyai pengalaman dibidang tersebut (Aven, 2016). Penelitian (Cervantes et., al 2018) memberikan usulan untuk pengungkapan manajemen risiko lebih lengkap setelah pengungkapan yang wajib dilaporkan sudah terpenuhi.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan karakteristik dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, pengalaman dewan komisaris dan pengungkapan manajemen risiko terhadap keberadaan komite manajemen risiko yang ada di perusahaan.

KAJIAN TEORITIS

Teori keagenan

Teori keagenan adalah teori yang memberikan penjelasan atas hubungan secara kontraktual yang terjadi pada *principle* dan *agents*. Pihak *principle* menjadi pihak yang memberikan mandatori kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Ramos & Cahyonowati, 2021). Konflik keagenan yang dapat terjadi antar hubungan tersebut antara lain *moral hazard* dan *risk aversion*. Munculnya konflik antar kedua belah pihak dapat diminimalkan apabila manajemen dalam melakukan aktivitas menjalankan kegiatan usaha berdasarkan keinginan dan menyesuaikan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam hal pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh manajemen harus disesuaikan dengan kepentingan dan monitoring serta pengawasan oleh pemegang saham.

Meskipun belum ada peraturan yang mewajibkan pembentukan RMC (*Risk Management Committee*) sebagai komite yang secara khusus berperan dalam pengawasan risiko, perusahaan dapat membentuk RMC dalam komitmennya menuju praktek good corporate governance.

Teori ketergantungan

Teori ketergantungan sumber daya (*Resource Dependence Theory*) dikemukakan oleh Pfeffer and Salancik (1978) dan dituliskan kembali oleh (Soliha & Maharani, 2012). Teori ini menjelaskan adanya aktivitas dan kaitan organisasi dan hubungannya dengan sumber lingkungan. (Soliha & Maharani, 2012) menjelaskan bahwa teori ketergantungan sumber daya mempunyai focus pada peran penting Direksi (dalam hal ini manajemen) saat menyediakan atau mengamankan sumber daya yang penting untuk organisasi terkait pengelolaan mereka dengan lingkungan eksternalnya. Dalam konteks manajemen risiko, teori ini memberikan prediksi dimana Dewan Komisaris dapat mengambil keuntungan dalam mengungkapkan manajemen risiko berdasarkan keahlian, *prestise* dan hubungan sosial yang dimiliki.

Di Indonesia pengungkapan risiko di Indonesia juga sudah diatur secara jelas baik dalam PSAK maupun aturan OJK, pengungkapan risiko manajemen dikategorikan menjadi dua elemen yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara. Setiap emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan informasi material lainnya kepada pengawas bursa efek dan publik. OJK juga mengeluarkan peraturan atas kewajiban menyampaikan pengungkapan manajemen risiko nomor 57/POJK.04/2017 pada Pasal 37 (2) tentang kewajiban minimal yang dapat diungkapkan dalam manajemen risiko bagi perusahaan yang sudah go publik.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko

Kepemilikan institusional berperan penting dalam suatu perusahaan berdasarkan besaran saham yang dimiliki oleh institusi. Kebiasaan yang terjadi adalah investor yang memiliki saham yang besar mempunyai kemampuan untuk mengurangi masalah keagenan serta keahlian yang baik dalam memberikan arah dan kebijakan karena investor jenis ini mampu masuk dalam masalah yang dihadapi perusahaan (Alshirah et al., 2020). Investor yang relatif besar mampu secara intensif dalam segi pengawasan yang lebih ketat dan mampu mengendalikan manajemen dalam upaya mengurangi biaya agensi serta meningkatkan peran investor dalam memberikan pengawasan pada perusahaan tempatnya berinvestasi. Selain itu, pemegang saham mayoritas dimungkinkan dapat memegang kendali lebih besar dalam perusahaan sehingga mampu memberikan tekanan bagi pihak manajemen

untuk melakukan pengungkapan *enterprise risk management* yang lebih luas dan kontrol yang jelas atas perusahaan untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan (Agista & Mimba, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H1 = Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko (RMC)

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko

Banyaknya personal Dewan Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan wajib mendasarkan pada peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014. Proporsi banyaknya anggota Dewan Komisaris Independen dari total Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai indikator independensi dewan komisaris dari manajemen perusahaan. Kehadiran mereka dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan sebagai fungsi pengendali aktivitas suatu perusahaan. Komisaris Independen dapat mempengaruhi *enterprise risk* . Penelitian lain yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *enterprise risk management* (Manurung et al., 2016) dan (Abbas et al., 2021). Dewan Komisaris independen yang dipilih dalam RUPS merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan baik sebagai pegawai ataupun keluarga karena mewakili kepentingan *shareholder* dan masyarakat luas. Dewan Komisaris yang dipilih dapat berasal dari *public figure* atau pensiunan TNI/Polri karena mempunyai kepribadian yang baik dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Perusahaan dengan jumlah proporsi Dewan Komisaris Independen yang tinggi cenderung dapat lebih memperhatikan resiko yang ada dan kemungkinan dapat terjadi sehingga dapat diasumsikan memahami pentingnya keberadaan RMC sebagai suatu unit yang penting dan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantunya dalam mengawasi manajemen dan tanggungjawab perusahaan dalam mengelola resiko dibandingkan dengan proporsinya yang lebih rendah (Wiradharma & Muid, 2014) (Puławska et al., 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H2 = Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko (RMC)

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko

Jenjang pendidikan memegang peranan penting bagi perorangan yang akan menduduki suatu jabatan. Hal tersebut berperan penting dalam pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang ekonomi, manajemen, keuangan dan bisnis mempunyai kecenderungan dapat memahami kompleksitas dalam perusahaan dan masalah yang dihadapinya. (Widianti et al., 2019) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris dapat dipersyaratkan memiliki kemampuan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan yang memadai agar mereka mampu melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dimungkinkan dapat meningkatkan hasil kinerjanya karena Dewan Komisaris tersebut paham terhadap akuntansi dan tidak mudah dipermainkan oleh manajemen perusahaan dan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi (Abdullah, 2018) dan (Saputra et al., 2020). Laporan tahunan yang disyaratkan oleh OJK harus mengungkapkan manajemen resiko juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pihak manajemen dan RUPS untuk memilih Dewan Komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai sesuai dengan jenis industri yang diawasi. Dewan Komisaris dapat secara cermat mampu melakukan analisis dari hasil pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh tim manajemen dan mengambil kebijakan, langkah yang diperlukan untuk mengendalikan resiko yang muncul sehingga dapat menaikkan reputasi perusahaan di masyarakat . Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H3 = Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko (RMC)

Pengaruh Pengalaman Dewan Komisaris terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen perusahaan, pengetahuan dibidang ilmu yang ditekuninya dan kekuatan organisasi yang pernah dan sedang dijalani dapat menyeimbangkan wawasan dan kemampuan dalam mengelola anggota dewan komisaris yang berusia diatasnya, lebih senior dan mempunyai masa kerja yang lebih lama dan gagasan yang diajukan oleh anggota yang lebih muda dan kurang ahli dibidangnya . Mendasarkan pada teori ketergantungan sumber daya yang menjelaskan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki Dewan Komisaris maka diasumsikan semakin tinggi pengetahuan dan kemampuannya pula. Menurut (Ramos & Cahyonowati, 2021) Dewan Komisaris yang telah berpengalaman selama beberapa tahun di perusahaan dapat mengembangkan praktek *good corporate governance* termasuk pengungkapan manajemen

risiko yang menjadi bagiannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H4 = Pengalaman Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko (RMC)

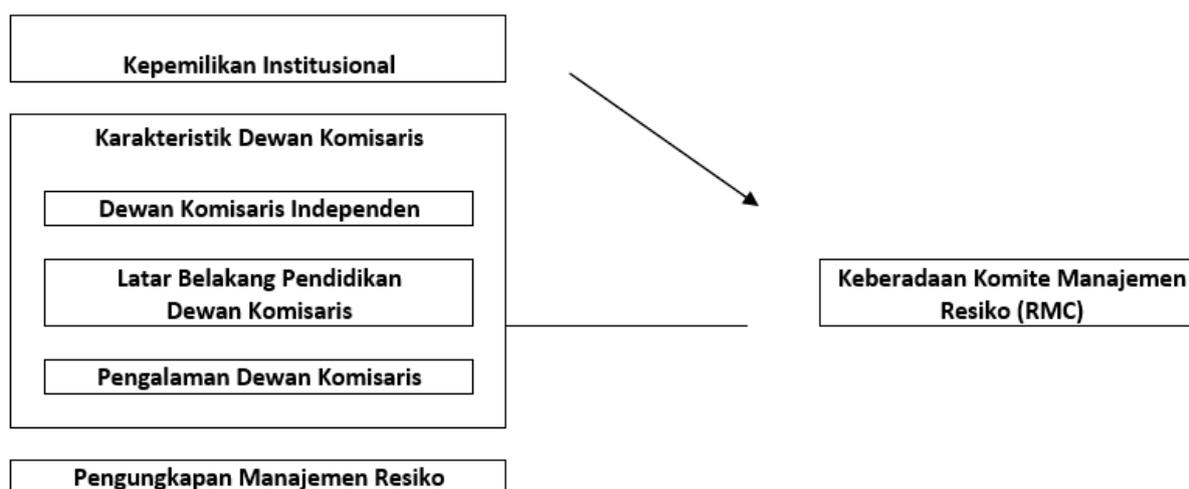
Pengaruh Pengungkapan Manajemen Resiko terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko

Manajemen resiko penting untuk diadakan dan diungkapkan sehingga memunculkan kesadaran bagi perusahaan atas munculnya banyak kasus kegagalan dan skandal bisnis dan keuangan. Covid 19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia membuat banyak pebisnis mengalami kerugian dan keterpurukan. Keberadaan manajemen resiko menjadi wajib diungkapkan oleh perusahaan yang sudah go publik nomor 57/POJK.04/2017 pada Pasal 37 (2) memungkinkan perusahaan dapat membentuk Komite Manajemen Resiko (RMC) agar dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih fokus dan cermat masih belum diungkapkan secara jelas dan lengkap. (Noor et al., 2016) dan (Kiflee et al., 2019) menjelaskan bahwa keberadaan komite manajemen risiko yang berdiri sendiri berhubungan positif dengan pengungkapan manajemen resiko. RMC mempunyai peran dalam memantau aktivitas perusahaan dan memberikan cakupan yang lebih luas untuk mengidentifikasi resiko di dalam perusahaan tetapi memiliki keterbatasan pada kekurangan bukti empiris. Keberadaan komite manajemen risiko yang berdiri sendiri dapat memberikan pengaruh terhadap resiko pengungkapan tekstual perusahaan (Rahayu et al., 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H5 = Pengungkapan Manajmen Resiko terhadap Keberadaan Komite Manajemen Resiko (RMC)

Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis pemikiran dibuat berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis yang sudah dijelaskan diatas selanjutnya diterjemahkan pada gambar dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Teoritis

METODE PENELITIAN

Penelitian yang disajikan merupakan penelitian deduktif yang mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis melalui validitas teori atau menguji pada teori tertentu. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup dan membatasi pembahasan pada kepemilikan institusional, karakteristik Dewan Komisaris dan pengungkapan manajemen resiko terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan non keuangan sektor pertambangan dan aneka industri pada periode tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel Keberadaan Komite Manajemen Resiko (RMC)

Fungsi RMC yang ada dapat dijalankan secara terpisah oleh komite tersendiri atau digabung dengan komite audit. Perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC dalam laporan tahunannya diberikan nilai satu (1), sebaliknya nilai nol (0) (Andarini & Januarti, 2012).

Variabel Independen

Variabel Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional yaitu saham perusahaan mayoritas yang dimiliki oleh instansi atau lembaga lain (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain) (Fitriana, 2019). Kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan prosentase kepemilikan saham institusi dengan kepemilikan lebih dari 5% yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2021. Apabila suatu perusahaan terdapat lebih dari

satu kepemilikan institusi yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh kepemilikan institusional. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan rumus (Fitriana, 2019) :

$$\% \text{ Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total jumlah saham yang beredar}}$$

Variabel Komisaris Independen

Komisaris independent yaitu anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai afiliasi dengan direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari kepentingan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memberikan kebijakan dan masukan bagi perusahaan. Tindakan dan keputusan yang dilakukan dalam bertindak independen atau aktivitas semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Dalam penelitian ini independensi dewan komisaris dinyatakan dalam presentase jumlah anggota komisaris independen pada dewan dibandingkan dengan jumlah total jumlah dewan komisaris (Handayani, 2017):

$$\% \text{ Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independent}}{\text{Total jumlah dewan komisaris}}$$

Variabel Latar Belakang Pendidikan Dewan komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas serta memberi nasehat sesuai yang bermanfaat untuk tujuan perusahaan. Pemahaman dalam bidang akuntansi, bisnis, manajemen dan keuangan yang mendalam akan membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dalam perusahaan. Dalam penelitian ini latar belakang Pendidikan dewan komisaris diukur dengan (Saputra et al., 2020) :

$$\% \text{ Latar belakang pendidikan Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah DK yang berpendidikan akuntansi, bisnis, manajemen, keuangan}}{\text{Total jumlah dewan komisaris}}$$

Variabel Pengalaman Dewan Komisaris

Dari teori ketergantungan atas sumber daya yang ada, Dewan Komisaris yang mempunyai relasi dan akses ke sumber daya eksternal menjadi hal yang penting dalam mempengaruhi budaya organisasi sehingga dapat memastikan adanya peningkatan kinerja (Octosiva, 2015). Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh dewan komisaris maka

akan semakin besar kemampuan dan keahliannya dalam mengawasi manajemen. Dalam penelitian ini pengalaman Dewan Komisaris diukur dengan (Ramos & Cahyonowati, 2021):

$$\% \text{ Pengalaman Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris yang melayani lebih dari 3 tahun}}{\text{Total jumlah dewan komisaris}}$$

Variabel Pengungkapan Manajemen Resiko

Pengungkapan manajemen resiko diatur dalam POJK nomor 57/POJK.04/2017 pada Pasal 37 (2) dan dijelaskan bahwa kebijakan manajemen resiko dalam laporan tahunan paling sedikit memuat :

1. Strategi dan kerangka manajemen resiko yang komprehensif
2. Prinsip kehati-hatian
3. Penyediaan modal yang mencukupi
4. Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. System deteksi dini
6. Identifikasi, dan diversifikasi resiko
7. Pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko
8. Limit resiko yang diambil dan toleransi resiko terhadap kecukupan permodalan
9. Mitigasi resiko
10. Keterbukaan dan budaya sadar resiko

Pengungkapan risiko tersebut merupakan hal yang minimal dimuat dalam laporan tahunan perusahaan dengan jumlah sebanyak 10 item. Penilaian dilakukan dalam bentuk angka 1 (satu) jika perusahaan tersebut melakukan pengungkapan risiko, dan jika tidak melakukan pengungkapan risiko diberikan nilai 0 (nol) (Ramos & Cahyonowati, 2021):

$$\% \text{ Pengungkapan Manajemen Resiko} = \frac{\text{Jumlah pengungkapan resiko perusahaan}}{\text{Total jumlah resiko}}$$

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang dan aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2021. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini. Kriteria yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang melaporkan annual report secara lengkap

Berdasarkan sektor yang diteliti yaitu sektor perusahaan tambang dan aneka industri sebanyak 102 perusahaan, pada tahun 2021.

2. Deskripsi Statistik

Tabel 1. Deskripsi Statistik

| Keterangan | N | Range | Minimum | Maksimum | Mean | Std Deviasi |
|-------------------------------|----|--------|---------|----------|---------|-------------|
| Kepemilikan Institusional | 45 | 1.0000 | .0000 | 1.0000 | .520556 | .3486526 |
| Komisaris Independen | 45 | .4500 | .2200 | .6700 | .433311 | .1081253 |
| Pendidikan Dewan Komisaris | 45 | 1.0000 | .0000 | 1.0000 | .579333 | .2536587 |
| Masa kerja Dewan Komisaris | 45 | 1.0000 | .0000 | 1.0000 | .436533 | .3077571 |
| Pengungkapan Manajemen Resiko | 45 | .7800 | .2200 | 1.0000 | .826667 | .2222509 |
| Keberadaan Komite Resiko | 45 | 1.00 | .00 | 1.00 | .6889 | .46818 |
| Valid | 45 | | | | | |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,521 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 0,349. Variabel komisaris independen memiliki nilai terendah sebesar 0,22 dan nilai tertinggi sebesar 0,67 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,433 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,108. Variabel Pendidikan memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,579 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,254. Variabel masa kerja memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,436 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,307. Variabel pengungkapan manajemen resiko memiliki nilai terendah sebesar 0,22 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,826 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,222. Variabel keberadaan komite resiko memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,689 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,468.

3. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Persamaan regresi yang dipergunakan adalah :

$$RMC = \beta_0 + \beta_1 ACK_i + \beta_2 ACDK_i + \beta_3 CPDK_i + \beta_4 ACPLDK_i + \beta_5 ACPMR_i + e$$

Keterangan :

- RMC : Komite Manajemen Resiko (RMC), dimana 1 = mempunyai komite manajemen resiko , nilai 0 = tidak mempunyai komite manajemen resiko
- ACKI : Proporsi Kepemilikan Institusional dari total pemilikan saham yang beredar
- ACDKI : Proporsi Komisaris Independen dari total jumlah Dewan komisaris
- ACPKD : Proporsi Pendidikan Dewan Komisaris bidang akuntansi, keuangan, manajemen dan bisnis dari total jumlah Dewan Komisaris
- ACPLDK : Proporsi Pengalaman Dewan Komisaris > 3 tahun total jumlah Dewan Komisaris
- ACPMR : Proporsi jumlah pengungkapan manajemen resiko dari jumlah minimal yang diperkenankan
- B 0 : Konstanta
- B 1-5 : Koefisien regresi
- E : Kesalahan residual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Sampel Penelitian

Dari populasi perusahaan pertambangan dan aneka industri sebanyak 102 perusahaan tahun 2021 maka dijelaskan banyaknya sampel dalam penelitian ini pada tabel berikut :

Tabel 2. Sampel Penelitian

| Perusahaan yang menjadi sampel penelitian | Jumlah perusahaan |
|--|-------------------|
| Perusahaan sektor pertambangan dan aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2021 | 102 |
| Perusahaan yang tidak melaporkan annual report secara lengkap | (57) |
| Jumlah sampel | 45 |

Sumber : data sekunder yang diolah, 2022

2. Hipotesis Dan Pembahasan

Hasil pengujian *logistic regression* pada tabel 2 dapat dijelaskan pada model awal (-2LL intercept only) yang hasilnya sebesar 42.541 dan pada model final (-2LL Final) menunjukkan adanya nilai sebesar 27.707. Dari hasil 2LL intercept only dengan -2LL Final dijelaskan adanya penurunan nilai dan adanya tingkat signifikansi sebesar 1,3 %, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa model ini adalah model *logistic* yang baik (fit). Nagelkerke R-Square pada model ini mempunyai nilai 0,487 dan artinya menunjukkan bahwa

variabilitas variabel independen memiliki pengaruh yang besar sebanyak 48,7 % terhadap variabilitas variabel dependen dan sisanya sebanyak 51,3 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam model regresi. Dari nilai Nagelkerke sebesar 0,487 dapat dijelaskan bahwa variabel independen dapat digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan insitusional, karakteristik dewan komisaris dan pengungkapan manajemen resiko terhadap keberadaan komite manajemen resiko.

Tabel 3. Hasil pengujian Logistic Regresion Pengujian Hipotesis

| Variabel | Coff | Wald | Sig. |
|--------------------------------|--------|-------|--------|
| Konstanta | -7,999 | 2.241 | .013 |
| ACKI | -1.026 | .336 | .562 |
| ACDKI | 3.148 | 1.175 | .278 |
| ACPDK | -7.622 | 5.514 | .019 |
| ACPLDK | 16.757 | 4.039 | .044 |
| ACPMR | 6.034 | 3.388 | .056 |
| -2loglikelihood Intercept Only | | | 42.541 |
| -2loglikelihood Final | | | 27.707 |
| Chi-Square | | | 14.833 |
| Model Fitting Sig. | | | 0.013 |
| Nagelkerke R-Square | | | 0.487 |

Sumber : Data diolah tahun 2022

Hasil uji untuk hipotesis pertama adalah untuk membuktikan bahwa kepemilikan institutional saham (ACKI) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) tetapi hasil yang diperoleh yaitu menolak hipotesis pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional bukan sebagai pihak yang mempunyai kebijakan perlu tidaknya keberadaan RMC. RMC kemungkinan diadakan karena adanya kewajiban bagi perusahaan berdasarkan pertauran yang ada dan mengingat hal tersebut penting untuk kelangsungan bisnisnya meskipun tanpa melalui persetujuan pemilik saham institusional.

Hasil uji untuk hipotesis kedua adalah untuk membuktikan komisaris independen (ACDKI) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) tetapi hasilnya menolak hipotesis kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen kemungkinan juga merangkap sebagai komite manajemen resiko karena pengelolaan manajemen resiko berada dibawah pengawasan dewan komisaris. Aktivitas pengungkapan manajemen resiko dalam penelitian ini ada yang dilakukan oleh bagian audit internal dan berada dibawah direksi dan bukan pada dewan komisaris. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andarini dan Januarti (2012) yang menyatakan bahwa keberadaan RMC yang berada di bawah dewan komisaris akan lebih efektif dalam pengungkapannya dan dalam laporan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.

Hasil uji untuk hipotesis ketiga adalah untuk membuktikan pendidikan dewan komisaris (ACPDK) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) dan hasilnya menerima hipotesis ketiga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dewan komisaris dapat mempengaruhi keberadaan organ yang ada dibawahnya yaitu ada atau tidaknya komite manajemen resiko. Dewan komisaris yang memahami bahwa dalam perusahaan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dapat mengangkat komite manajemen resiko berdiri sendiri dan menjadi salah satu anggotanya. Apabila dewan komisaris menganggap penting adanya resiko yang perlu disampaikan dan menjadi bagian pengawasannya maka berdasarkan kompetensi / Pendidikan yang dimilikinya dapat membentuk komite resiko (RMC) sesuai bidang keahliannya dan demikian sebaiknya. Penelitian ini sejalan dengan (Widianti et al., 2019)

Hasil uji untuk hipotesis keempat adalah untuk membuktikan pengalaman dewan komisaris (ACPLDK) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) dan hasilnya menerima hipotesis keempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengalaman dewan komisaris pada organisasi tersebut lebih dari 3 tahun dapat mempengaruhi keberadaan organ yang ada dibawahnya yaitu ada atau tidaknya komite manajemen resiko. Dewan komisaris yang mempunyai deteksi dan memahami bahwa dalam perusahaan berdasarkan pengalaman dalam pengawasan manajemen perusahaan dapat mengangkat komite manajemen resiko atau hanya sebagai pihak yang meninjau pelaksanaan manajemen resiko yang ada pada direksi. Apabila dewan komisaris menganggap bahwa manajemen cukup mampu dalam mengelola resiko, selalu mengungkapkan dan melaporkan pada dewan komisaris, berdasarkan pengalaman yang dimilikinya maka dewan komisaris hanya sebagai pengawas saja dan mendapatkan laporan dari manajemen. Apabila dalam pengawasannya ternyata dewan direksi membutuhkan adanya organ yang langsung dibawah kendalinya (RMC) maka sebaiknya diadakan untuk pengawasan yang sifatnya independen kepada manajemen dan tidak dilakukan manipulasi hasilnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ramos & Cahyonowati, 2021)

Hasil uji untuk hipotesis kelima adalah untuk membuktikan pengungkapan manajemen resiko (ACPMR) berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC) dan hasilnya menerima hipotesis kelima. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya pengungkapan manajemen resiko dapat mempengaruhi ada atau tidaknya keberadaan komite manajemen resiko (RMC). Tingginya resiko yang dikelola oleh perusahaan akan mengakibatkan luasnya pengungkapan manajemen resiko semakin mengakibatkan pentingnya keberadaan RMC sebagai organ dewan komisaris dan tidak

menjadi bagian dari audit internal, sehingga pengungkapan yang dilakukan oleh RMC dapat dipertanggungjawabkan. Pengungkapan manajemen resiko dan laporan audit internal dalam pengawasan direksi untuk pengendalian sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan pada perusahaan yang sudah go publik (Ahmad et al., 2015). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Andarini & Januarti, 2012) tetapi sejalan dengan penelitian (Bensaid et al., 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional saham dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC). Pendidikan dan pengalaman dewan komisaris serta pengungkapan manajemen resiko berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen resiko (RMC). Penelitian ini menjelaskan bahwa besarnya pengungkapan manajemen resiko berimplikasi pada keberadaan komite manajemen resiko (RMC) yang berada dibawah dewan komisaris. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan keberadaan komite manajemen resiko (RMC) karena semakin tingginya tingkat resiko dan kompleksitas aktivitas perusahaan di masa mendatang. Dalam penelitian ini dari 45 perusahaan yang menjadi sampel , hanya 15 perusahaan atau sebesar 33% yang mempunyai komite manajemen resiko (RMC) dan sisanya menggabungkan dengan komite audit dan bagian audit internal. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dan menambah variabel antara lain keberadaan komite audit, audit internal dan kepemilikan manajerial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Roshima Said. 2018. "The Influence of Corporate Governance and Human Governance towards Corporate Financial Crime: A Conceptual Paper".
- Abbas, D. S., Ismail, T., Taqi, M., & Yazid, H. (2021). Determinants of enterprise risk management disclosures: Evidence from insurance industry. *Accounting*, 7(6), 1331–1338. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.4.005>
- Agista, G. G., & Mimba, N. P. S. H. (2017). Pengaruh Corporate Governance Structure dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 438–466.
- Ahmad, R. A. R., Abdullah, N., Jamel, N. E. S. M., & Omar, N. (2015). Board Characteristics and Risk Management and Internal Control Disclosure Level: Evidence from Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31(2011), 601–610. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01147-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01147-8)

- Alshirah, M. H., Alshira'h, A. F., & Lutfi, A. (2020). Audit committee's attributes, overlapping memberships on the audit committee and corporate risk disclosure: Evidence from Jordan. *Accounting*, 7(2), 423–440. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.11.008>
- Andarini, P., & Januarti, I. (2012). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN*. 9(1), 83–99.
- Aven, T. (2016). Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. *European Journal of Operational Research*, 253(1), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.12.023>
- Badriyah, N., Sari, R. N., & Basri, Y. M. (2015). The Effect of Corporate Governance and Firm Characteristics on Firm Performance and Risk Management as an Intervening Variable. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 868–875. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01184-3](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01184-3)
- Bensaid, A., Bin Ishak, S., & Binti Mustapa, I. R. (2021). Risk management committee attributes: A review of the literature and future directions. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(3), 388–395. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090313>
- Cervantes-Cabrera, O. A., & Briano-Turrent, G. D. C. (2018). The importance of Risk Management Assessment: A proposal of an Index for Listed Companies. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 1(2), 122–137. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v1i2.11747>
- Falendro, A., Faisal, & Ghozali, I. (2018). Karakteristik Dewan Komsiaris. *Jurnal Reviu Dan Akuntansi Keuangan, Vol. 8, No*(Corporate Governance, Board of Commissioner, Enterprise Risk Management, Risk Management Committee, Disclosure).
- Fitriana, R. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 8(2), 1–18. <https://doi.org/10.34010/jika.v8i2.1652>
- Handayani, R. (2017). Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance di perusahaan perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(3), 114–131.
- Hasina, G., Nazar, M. R., & Budiono, E. (2018). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Pada Sektor Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2402–2409.
- Jovanović, F., Milijić, N., Dimitrova, M., & Mihajlović, I. (2016). Risk management impact assessment on the success of strategic investment projects: Benchmarking among different sector companies. *Acta Polytechnica Hungarica*, 13(5), 221–241. <https://doi.org/10.12700/aph.13.5.2016.5.13>
- Juwita, A., & Jurnal, T. (2020). Analisis Pengaruh Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia. *Global Financial Accounting Journal, Vol. Vol. 4, No. 1, April 2020 ISSN: 2655-836X*, V(Vol 4 No 1 (2020)), 14. <https://journal.uib.ac.id/index.php/gfa/article/view/755>

- Karunaratne, A. H. G. . (2017). Research in Business and Social Science The Impact of the Adoption of Enterprise Risk Management on the Industrial Financial Performance : Evidence from Sri Lanka. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 6(6), 9–20.
- Manurung, D. T. H., & Kusumah, R. W. R. (2016). Telaah Enterprise Risk Management melalui Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 204, 335–348. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7025>
- Mohammed, H. K., & Knapkova, A. (2016). The Impact of Total Risk Management on Company's Performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 220(March), 271–277. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.499>
- Mousa, G. A., & Elamir, E. A. H. (2014). The effect of governance mechanisms on the quality of risk disclosure: using bootstrap techniques. *American J. of Finance and Accounting*, 3(2/3/4), 128. <https://doi.org/10.1504/ajfa.2014.060811>
- Noor, S. B., Rahman, R. A., & Ismai, T. (2016). Governance and Risk Management: Empirical Evidence from Malaysia and. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 2(3), 21. <https://doi.org/10.20525/.v2i3.152>
- Octosiva, F. M. T. A. A. H. (2015). *134-13-182-3-10-20181004*. 210–231.
- Puławska, K., Dobija, D., Piotrowska, K., & Kravchenko, G. (2021). Audit Committee Formation: The Case of Poland. In *Central European Management Journal* (Vol. 29, Issue 2). <https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.50>
- Rahayu, N. K., Harymawan, I., Ekasari, W. F., & Nowland, J. (2021). Risk management committee, independent commissioner, and audit fee: An update. *Cogent Economics and Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1892926>
- Ramos, J., & Cahyonowati, N. (2021). Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Terhadap Pengungkapan Risiko. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–15.
- Ratna, S. D., Dwi, C., & Astrid, M. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Risk Management Committee Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 139–149.
- Riyard Bin Kiflee, A. K., & Noor Azli Bin Ali Khan, M. (2019). Relationship between Corporate Governance and Risk Disclosure Practice from Malaysia Perspective. *KnE Social Sciences*, 2019(2015), 66–89. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i22.5045>
- Ruhana, C. (2014). *Review of Enterprise Risk Management (ERM) Literature Salinah Haji Togok*.
- Saputra, F. W., Maranata, B. H., Kenny, S., & Raharjo, S. (2020). Pengaruh Pendidikan Dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dalam Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan. 1(1), 16–20.

- Soliha, E., & Maharani, K. (2012). Organisasi Dan Lingkungannya. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(1), 138–153.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1329>
- Widianti, Y., Hermawan, S. E. A., MSIE, A., & Ridwan, M. (2019). *Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management, Pengungkapan Intellectual Capital Dan Pengungkapan Sustainability* <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43363>
- Wiradharma, R. Y., & Muid, D. (2014). KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC) SECARA SUKARELA (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Finansial di BEI Tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2012), 1–14.